

TINGKAT PENDIDIKAN, UPAH MINIMUM, & TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Khindya Alifah¹, Niniek Imaningsih²,

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
UPN “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia
alifahkhindya@gmail.com

Abstrak

Pembangunan ekonomi secara merata adalah usaha yang selalu dimaksimalkan oleh tiap negara berkembang, namun adanya kemiskinan menjadi masalah yang pasti selalu dimiliki oleh setiap Negara ini. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, upah minimum, dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010-2021. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang di peroleh dari BPS Daerah Istimewa Yogyakarta berupa data time series. Metode yang digunakan ini menggunakan metode kuantitatif yang diolah dengan analisis liner berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS) dan dengan menggunakan SPSS 23.0 for windows. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan variabel tingkat pendidikan, upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan secara parsial upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta, tingkat pendidikan serta tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata kunci: Kemiskinan, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka

Abstract

Equitable economic development is an effort that is always maximized by each developing country, but the existence of poverty is a problem that every country must always have. The purpose of this study is to find out the effect of education level, minimum wage, and education level on poverty level in the province of the Special Region of Yogyakarta in 2010-2021. The data in this study used secondary data obtained from BPS Yogyakarta Special Region in the form of time series data. Method used of this study used a quantitative method that was processed by multiple linear analysis with the Ordinary Least Square (OLS) model and by using SPSS 23.0 for windows. The results of this study show that the variables of education level, minimum wage, and open unemployment rate have an effect on the poverty rate in the province of the Special Region of Yogyakarta. And partially the minimum wage has a positive and significant effect on the poverty level of the Special Region of Yogyakarta, the level of education and the open unemployment rate has no effect on the poverty level in the Special Region of Yogyakarta.

Keywords: Poverty, Education Level, Minimum Wage, Open Unemployment Rate

PENDAHULUAN

Setiap negara berkembang melakukan upaya terbesar untuk memastikan kesetaraan pembangunan, namun kemiskinan adalah masalah yang harus dihadapi semua negara. Pada kenyataannya, negara mendorong pertumbuhan untuk mewujudkan kekayaan lingkungan dan meningkatkan sistem ekonomi. Meningkatkan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, menurunkan disparitas pendapatan, dan menghilangkan kemiskinan merupakan bagian dari proses pembangunan yang mencakup beberapa aspek kehidupan. (Pdrb et al., 2018) Namun, negara ini memiliki masalah dengan pembangunan ekonomi,

termasuk jumlah penduduk yang besar, kesenjangan pendapatan, pengangguran, dan kemiskinan.

Kemiskinan masih menjadi masalah di semua negara maju dan berkembang, kemiskinan ditandai dengan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan diartikan sebagai keterbatasan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan berbeda. Kemiskinan berkaitan erat dengan standar hidup layak minimum kelompok tertentu, sedangkan ketimpangan pendapatan menyebabkan standar hidup yang berbeda tergantung pada perspektif seseorang. Situasi dimana individu tidak dapat

memenuhi kebutuhannya adalah masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan begitu kompleks sehingga membutuhkan lebih banyak pekerjaan.

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan multidimensi di berbagai negara berkembang termasuk Indonesia. Dari sisi Badan Pusat Statistik, kemiskinan diukur dengan menggunakan garis kemiskinan, yang merepresentasikan ketidakmampuan memenuhi kebutuhan ekonomi (BPS, 2021:13). Kemiskinan merupakan salah satu data fundamental yang dicatat oleh pemerintah di setiap negara pada pertengahan tahun. Kemiskinan adalah gambaran kehidupan di banyak negara berkembang, termasuk lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia. Kemiskinan merupakan masalah yang disebabkan oleh situasi nasional negara dan situasi global. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi (Ihsan et al., 2018). Selain menimbulkan risiko dan ketidakpastian bagi masa depan ekonomi global, saling ketergantungan antarnegara juga menimbulkan kesulitan dan membatasi kemampuan suatu negara untuk membangun perekonomiannya. Setiap negara berkembang, termasuk Indonesia, bagaimanapun juga mengalami kemiskinan sebagai realitas masyarakat. Indonesia merupakan negara berkembang dengan masalah kemiskinan.

Kemiskinan adalah masalah yang memiliki banyak wajah dan biasanya kompleks dan multidimensi. Ini akan terus menjadi masalah dari waktu ke waktu. Sejumlah faktor yang saling terkait, seperti tingkat pendapatan, pendidikan, akses sumber daya, lokasi geografis, jenis kelamin, dan keadaan lingkungan, semuanya berdampak pada kemiskinan (Renggapratiwi, 2019).

Persentase penduduk yang miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya disebut angka kemiskinan. Kemiskinan telah membatasi kemampuan komunitas untuk menjalankan hak asasinya dan mendapatkan akses ke kebutuhan dasar. Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dengan banyak aspek, termasuk sosial dan ekonomi. Sementara dimensi ekonomi berkaitan dengan pendapatan setiap individu dan keadaan ekonomi bangsa, dimensi sosial mengacu pada stratifikasi sosial atau pembagian antara si kaya dan si miskin.

Banyak faktor, seperti kurangnya kesempatan kerja yang mengakibatkan pengangguran, hasil pendidikan dan kesehatan yang buruk, terkait dan berdampak pada masalah kemiskinan. Pemerintah pusat dan provinsi di Indonesia bekerja sama untuk menerapkan strategi yang telah ditetapkan yang bertujuan untuk mengentaskan masalah kemiskinan, tetapi masih ada ketidaksesuaian antara kebijakan yang dimaksudkan dengan situasi aktual. Seperti yang dapat diamati dari sekolah, yang akan berdampak pada peningkatan produksi, penekanan juga harus ditujukan pada pengembangan sumber daya

manusia terbaik untuk mengatasi masalah kemiskinan. Ketersediaan fasilitas pendidikan dan peningkatan standar pendidikan warga dapat menjadi indikator keberhasilan pembangunan (Giovanni, 2018: 25).

Proses industri sangat membutuhkan pengetahuan sumber daya manusia karena dampaknya terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan keterampilan sumber daya manusia. Tingkat kemiskinan dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja sehingga mengakibatkan rendahnya produktivitas yang pada akhirnya bermuara pada pendapatan yang rendah. Salah satu Sustainable Development Goals (SDGs), No Poverty, membahas isu kemiskinan (No Poverty). Seluruh dunia, termasuk Indonesia, setuju dan berdedikasi untuk mengakhiri kemiskinan. Secara khusus, isu ketimpangan yang merembes berkontribusi pada persistensi kemiskinan di Indonesia. Indonesia berdedikasi untuk mengejar pembangunan yang konsisten dengan SDGs sebagai anggota PBB (Ishartono dan Santoso, 2016: 160).

Kemiskinan masih sering dipahami dengan sebagai kondisi serba kekurangan uang dan bahan pokok untuk menjamin kelangsungan hidup (Mahsunah, 2013). Menurut teori lingkaran setan kemiskinan, ketika suatu negara berkembang mengalami kemiskinan sebagai akibat rendahnya produktivitas kegiatan yang mengakibatkan rendahnya pendapatan masyarakat dan tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan minimal, maka modal masyarakat berkurang karena masyarakat tidak dapat simpan (Nurkse pada tahun 2004). (Kuncoro, 2004). Manning dan Junankar (1998) menyatakan bahwa pada zaman pembangunan, orang miskin yang tidak mampu menyesuaikan diri dengan keadaannya disebut sebagai pengangguran. Banyak penduduk kerja yang menganggur, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya pendidikan yang berujung pada kemiskinan (Seran, 2017). Menurut Dariwardani (2014), pendidikan tidak diragukan lagi terkait dengan fenomena kemiskinan; Secara umum, fenomena kemiskinan menurun seiring dengan meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat. Namun, tingginya jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi menghadirkan masalah yang signifikan bagi bangsa (Lim, 2011). Lulusan perguruan tinggi yang mengalami pengangguran menyalahgunakan sumber daya manusianya. Isu-isu tersebut harus diselesaikan oleh pemerintah (Meidani, 2011).

Hal ini disebabkan oleh pengamatan bahwa sistem pendidikan tidak sesuai dengan pengetahuan dan pelatihan yang dibutuhkan di industri (Mahmood & et al., 2014). Peningkatan produktivitas dapat memicu ekspansi ekonomi. Sumitro Djojohadikusumo berkata bahwa, pola kemiskinan ada empat jenis yaitu, *Persistent*

Poverty, Cyclical Poverty, Seasonal Poverty, dan Accidental Poverty. Secara ekonomi, kemiskinan dapat juga dilihat dari keadaan kekurangan sumber daya atau kebutuhan yang digunakan dalam kelangsungan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang-orang. (van/indrawiguna, 2013) Dengan meningkatkan standar pendidikan, perekonomian secara keseluruhan menjadi lebih produktif, yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keunggulan Edukasi Publik mengedepankan konsep-konsep inovatif yang mendukung kreativitas kewirausahaan, yang ditunjukkan dengan munculnya UMKM segar yang terus berkembang. UMKM memiliki kapasitas untuk mengambil pekerjaan dalam jumlah yang signifikan (Yuta, Ropika, & Suhartini, 2014). Peningkatan UMKM akan meningkatkan prospek dan penyerapan tenaga kerja. Kenaikan gaji akan berdampak dari waktu ke waktu. Gaji seseorang meningkat seiring dengan lamanya sekolah (Tisnawati & Shabrina, 2014). Proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penurunan kemiskinan akan terbantu oleh fenomena ini. Oleh karena itu, pekerjaan untuk orang miskin harus diperhitungkan untuk mempertahankan daya beli, karena hal ini akan membuat pendapatan yang diperoleh lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar atau meningkatkan kualitas hidup (Sri Budhi, 2013).

Akibatnya, inisiatif pengentasan kemiskinan harus memperhatikan kualitas pendidikan. Masalah upah adalah salah satu dari banyak yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Rendahnya pendapatan yang diperoleh masyarakat berkontribusi terhadap rendahnya pendapatan mereka dengan cara yang mencegah mereka menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. hidup. Perbedaan kualitas sumber daya manusia dapat menjadi penyebab rendahnya gaji. Tingkat produksi masyarakat langsung dipengaruhi oleh kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Standar yang tinggi dari masyarakat sering digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia.

Jika pemerintah mengabaikan variabel-variabel tersebut, maka masyarakat miskin akan terkurung dalam lingkaran kemiskinan yang berlangsung secara turun-temurun. Pendidikan dan pelatihan merupakan aspek krusial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang kemudian dapat mempengaruhi penentuan tingkat pendapatan yang diterima masyarakat. 2019:11 Soerya

Tingkat upah minimum negara bagian digunakan sebagai titik awal untuk menetapkan upah minimum di kota dan kabupaten yang tidak dapat mengidentifikasi wilayah geografisnya. Sejak 2008, upah minimum di provinsi DIY telah meningkat setiap tahun untuk mencerminkan biaya

mempertahankan standar hidup yang layak (KHL). Meskipun naik setiap tahun, tetapi biaya hidup naik, banyak orang masih perlu mendapatkan lebih dari upah minimum, jadi meskipun itu adalah jumlah yang adil, kenaikan upah tetap tidak perlu. Tingkat Ketercapaian Minimum (KHL) masih lebih tinggi dari upah minimum.

Harapan hidup relatif rendah, prospek pekerjaan sedikit, dan kematian anak tinggi. Tingkat pengangguran di sektor do-it-yourself cenderung menurun. Meski sudah menurun, pengangguran perlu ditanggulangi oleh pemerintah sebelum menjadi serius dan menimbulkan kemiskinan yang lebih banyak.

Tabel Persentase Penduduk Daerah Perkotaan menurut Provinsi, 2010-2035

Provinsi	2010	2015	2020	2025	2030	2035
Jawa Bar	65,7	72,9	78,7	83,1	86,6	89,3
Jawa Ten	45,7	48,4	51,3	54,3	57,5	60,8
DI Yogy	66,4	70,5	74,6	78,0	81,3	84,1
Jawa Tim	47,6	51,1	54,7	58,6	62,6	66,7

Berdasarkan table diatas tingkat urbanisasi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010 sebesar 66,4% dan pada tahun 2015 sebesar 70,5% pada tahun 2020 sebesar 74,6%, menurut BPS nilai urbanisasi ini akan terus meningkat sampai tahun 2035 yang artinya banyaknya perpindahan penduduk dari desa/kota ke kota lainnya (Setya Ningrum, 2017). Ada banyak factor yang menyebabkan terjadinya tingginya tingkat urbanisasi di Daerah Istimewa Yogyakarta salah satunya penduduk desa yang menganggap bahwa di kota memiliki banyak pekerjaan dan mudah mendapatkan penghasilan serta memiliki upah yang lebih tinggi. Penyebab tingkat kemiskinan di Provinsi DIY ini meningkat diantaranya ialah banyaknya penduduk asli DIY yang berpindah ke kota atau provinsi lain, walaupun terdapat banyaknya tempat wisata akan tetapi para pekerjanya rata rata dari luar daerah DIY sedangkan para penduduk asli DIY berpindah tempat dan mencari pekerjaan di luar DIY itu sendiri, lalu factor lain yang mempengaruhi tingkat kemiskinan itu tinggi karena tidak ada sawah dan perairan yang menjadi sumber kehidupan penduduk disekitar DIY, serta yang belum meratanya hasil usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan, padahal dampak kemiskinan sangat buruk terhadap perekonomian.

Komponen investasi mendukung sisi permintaan dari pertumbuhan ekonomi DIY. Kemajuan proyek jangka panjang, seperti pembangunan jembatan JLS dan jalan tol yang menghubungkan Jogja dan Solo, serta meningkatnya investasi nonbangunan pada kuartal tersebut, membuat kinerja investasi mulai menunjukkan keuntungan. Ulasan. Selain itu, komponen utama PDB DIY, pengeluaran rumah tangga, terus

meningkat sepanjang kuartal seiring dengan meningkatnya mobilitas sosial dan peningkatan pendapatan yang disebabkan oleh kenaikan upah minimum.(Febrianica, 2015).

TINJAUAN PUSTAKA

Persentase jumlah (jumlah) masyarakat miskin yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dianggap berada di bawah garis kemiskinan. Karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk memiliki input produksi atau karena kualitas input tersebut tidak mencukupi, anggota masyarakat yang memilih untuk tidak terlibat dalam proses perubahan tidak dapat memetik manfaat dari hasil proses pembangunan(Susanto & Pangesti, 2019). Karena rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) produsen itu sendiri, masalah kemiskinan telah menyebar seperti api ke negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Kurangnya kebutuhan dasar seperti air untuk minum, makanan untuk makan, pakaian untuk dipakai, dan tempat tinggal dikenal sebagai kemiskinan. ada Dua jenis pengukuran kemiskinan adalah kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif: Kemiskinan absolut, yaitu ukuran kemiskinan berdasarkan tingkat kebutuhan dan pendapatan. Seseorang dikatakan miskin jika pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Karena dipengaruhi oleh iklim dan elemen ekonomi lainnya selain budaya, mengidentifikasi komposisi dan tuntutan minimal adalah di mana konsep pengukuran kemiskinan absolut menghadirkan tantangan terbesar. Sedangkan Kemiskinan Relatif Menurut beberapa ahli, kemiskinan adalah akibat dari distribusi pendapatan yang tidak merata karena bahkan ketika pendapatan seseorang mencapai tingkat yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, kenyataannya pendapatannya masih lebih rendah daripada pendapatan di sekitarnya. faktor lingkungan yang menempatkan orang tersebut dalam kelompok miskin.

Badan Pusat Statistik (2020:12) menyebutkan beberapa ukuran yang digunakan untuk mengukur kemiskinan, seperti Head Count Index (HCI-P0) mengukur proporsi penduduk yang hidup dalam kemiskinan (GK), Kesenjangan antara rata-rata pengeluaran setiap penduduk miskin dengan garis kemiskinan diukur dengan Proverty Gap Index (PI). Semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, semakin tinggi skor indeksnya dan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index P2), yang merinci berapa banyak pengeluaran untuk makanan dan kebutuhan lainnya oleh masyarakat miskin. Kesenjangan antara kaya dan miskin dalam hal pengeluaran meningkat dengan skor indeks.

Pengertian Pengangguran Terbuka

Seseorang yang termasuk dalam kategori angkatan kerja yang menganggur dan tidak aktif mencari pekerjaan. Orang yang tidak bekerja sama

sekali atau bekerja kurang dari dua hari dalam seminggu menjelang sensus dianggap menganggur menurut sensus 2020 (BPS, 2020: 8). Seseorang yang tidak bekerja secara permanen atau tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan umumnya dianggap menganggur. Karena tidak semua orang yang mencari pekerjaan mendapatkannya, maka posisi masyarakat semakin terpuruk seiring dengan meningkatnya angka pengangguran.(Putri, 2021) Tingkat pengangguran adalah rasio dari jumlah penduduk yang bekerja, termasuk orang yang bekerja dan pencari kerja, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengangguran ialah salah satu contoh masalah yang sering kali kita dihadapi oleh negara berkembang seperti di Negara Indonesia(Windra et al., 2016).Pengangguran yang tingginya kemiskinan memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Dari sudut pandang masyarakat umum, orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap adalah kelompok masyarakat yang sangat miskin. Orang-orang yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil atau di sektor publik dan swasta termasuk masyarakat kelas menengah ke atas(Made Ariasih & Yuliarmi, 2021). Dengan kata lain, mereka yang tidak bekerja adalah orang miskin dan mereka yang bekerja adalah orang kaya. Tingginya pengangguran dapat berdampak terhadap perekonomian suatu Negara atau daerah sebab seseorang yang menganggur atau tidak bekerja maka orang tersebut tidak dapat menghasilkan barang dan jasa dan membuat produktifitas menurun, sehingga menyebabkan turunnya pendapatan perkapita(Azis et al., 2021).

Jika daya beli masyarakat berkurang maka permintaan akan barang dan jasa juga ikut menurun, dan akan menyebabkan perekonomian turun karena para investor tidak dapat melakukan ekspansi pada usahanya (Sari, 2021). Artinya dengan meningkatnya pengangguran maka PDRB ataupun PDB juga akan menurun 20 sehingga kesejahteraan semakin menurun dengan dibarengi naiknya kemiskinan juga. Seseorang yang tidak bekerja secara tetap atau tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan umumnya dianggap menganggur. Karena tidak semua orang yang mencari pekerjaan mendapatkannya, posisi masyarakat semakin terpuruk seiring dengan meningkatnya angka pengangguran. Tingginya angka pengangguran juga menunjukkan bahwa penduduk hanya berfungsi sebagai konsumen dan bukan sebagai kontributor aktif untuk menghasilkan output. Peluang orang untuk jatuh miskin karena kurangnya pendapatan hampir akan tumbuh jika kekayaan mereka menurun akibat pengangguran.

Ada dua kategori pengangguran, yaitu Pengangguran terbuka, menurut definisi Badan Pusat Statistik adalah penduduk yang telah memasuki angkatan kerja tetapi belum mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan untuk

mempersiapkan suatu usaha, atau mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dengan membagi jumlah pengangguran dengan jumlah orang yang dipekerjakan, persentase yang mewakili pengangguran terbuka di suatu wilayah dapat dihitung. Pengangguran di antara pekerja sementara atau warga negara.

Jenis Pengangguran

Meurut Sumarsono (2019:10) Di pasar tenaga kerja, pengangguran dihasilkan dari ketidaksesuaian antara penawaran dan permintaan. Berikut adalah beberapa jenis pengangguran yakni **Pengangguran reguler atau abrasif**

Pengangguran yang dianggap normal atau gesekan terjadi ketika sulit untuk mencocokkan pencari kerja dengan posisi terbuka.

Pengangguran musiman

Pengangguran musiman hanyalah—musiman. Siklus musim berdampak pada kegiatan ekonomi komune. Ada musim puncak ketika tenaga kerja sangat dibutuhkan dan musim lambat ketika aktivitas berada pada titik terendah. Saat Anda berganti-ganti antara aktif dan kendur, Anda akan mengalami pengangguran, yang akan segera diperbaiki setelah Anda kembali aktif.

Pengangguran berkala

Pengangguran siklus terjadi ketika bisnis mengalami kehilangan kepercayaan terhadap prospek mereka di masa depan. Sedemikian rupa sehingga efek negatif dari pandangan yang suram memberikan kemungkinan pekerjaan, yang meningkatkan tingkat pengangguran.

Pengangguran struktural

Ketika komposisi atau struktur ekonomi berubah, terjadi pengangguran struktural. Kemampuan tenaga kerja yang dibutuhkan harus berubah karena perubahan struktural, namun pencari kerja tidak dapat mempelajari keterampilan baru.

Pengangguran Teknologi

Pengangguran yang disebabkan oleh teknologi dan penggunaan mesin disebut sebagai pengangguran teknologi. Ini hasil dari kondisi manusia yang digantikan oleh mesin dan bahan kimia. Modifikasi ini dapat menyebabkan penggantian personel bisnis.

Pengertian Tingkat Pendidikan

Dalam bahasa Inggris berarti “education” berasal dari bahasa latin educare yang artinya menggali atau mengembangkan potensi anak atau siswa. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam rangka mengembangkan manusia melalui pengajaran dan pelatihan, menurut redaksi Kamus Pusat Bahasa Indonesia (2018:326). Pendidikan, sebagaimana didefinisikan oleh dewan redaksi Longman Advanced American Dictionary (2017:509), adalah proses mendorong pertumbuhan intelektual melalui studi akademis di sekolah menengah atau perguruan tinggi. Sumber daya yang fundamental untuk mengembangkan sumber daya

manusia adalah pendidikan (SDM).

Indeks Pendidikan merupakan salah satu indeks terpenting yang digunakan untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sumber daya yang fundamental untuk mengembangkan sumber daya manusia adalah pendidikan (SDM). Indeks Pendidikan merupakan salah satu indeks terpenting yang digunakan untuk menentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ada hubungan yang kuat antara kemiskinan dan pendidikan. Pendidikan berdampak pada angka kemiskinan karena kurangnya pendidikan merupakan salah satu penyebab kemiskinan (Parwa, I., G., N., J., L. & Yasa, I., W., 2019). Dengan meningkatkan produksi dan meningkatkan kesempatan kerja untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi, pendidikan dapat membantu memerangi ketidaksetaraan dan kemiskinan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa orang dengan tingkat pendidikan rendah tidak memiliki kemampuan yang diperlukan untuk bekerja di dunia bisnis (Itang, 2017). Mencapai proyeksi pertumbuhan nasional akan mudah dengan pendidikan yang tepat. Pendidikan diharapkan mampu menjawab persoalan kemiskinan, rendahnya produktivitas, dan lambannya pertumbuhan ekonomi. Tingkat pendidikan di daerah khas Yogyakarta menjadi sumber data penelitian ini. Untuk tahun 2010 sampai dengan 2021, variabel ini dinyatakan dalam persentase (%).

METODE PENELITIAN

Ini adalah strategi kuantitatif yang diterapkan dalam penelitian ini. Salah satu metode penelitian yang ditetapkan secara cermat, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga konstruksi desain penelitian, mengenai tujuan penelitian, latar belakang penelitian, objek penelitian, sampel data, sumber data, dan metodologi adalah kuantitatif. pendekatan (dari pengumpulan data ke untuk analisis data). Mencari informasi tentang hal-hal yang perlu diketahui dilakukan melalui teknik yang disebut penelitian kuantitatif, yang mengumpulkan data dalam bentuk statistik. Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kajian utama penelitian ini adalah pada hubungan antara tingkat pendidikan, gaji minimum, dan tingkat pengangguran terbuka (Made et al., 2013).

Akibat dari variabel bebas, maka variabel terikat adalah hasil atau variabel yang dipengaruhi. Hal ini sering disebut sebagai variabel terikat dalam bahasa Indonesia (Sugiyono, 2019:4). Variabel yang digunakan adalah variabel terikat yaitu kemiskinan, yaitu keadaan tidak mampu memenuhi kebutuhan yang paling mendasar sekalipun, seperti kebutuhan pangan dan non pangan. Variabel dependen ini dilambangkan dengan huruf Y. Selanjutnya variabel dependen (terkait) diubah oleh variabel independen, yaitu faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan tersebut. Dengan memperhatikan tingkat

pengangguran terbuka (X3), upah minimum (X2), dan tingkat pendidikan (X1) (Sugiyono, 2018:4).

Data deret waktu merupakan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan menurut time series dalam waktu atau periode yang telah ditentukan dikenal dengan data time series (Sugiyono, 2018:11). Data runtun waktu penelitian ini bersifat kuantitatif untuk sepuluh tahun terakhir, yaitu H 2010 hingga 2021, dengan mempertimbangkan data tahunan. Website resmi BPS Daerah Istimewa Yogyakarta menyediakan informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan informasi lain yang sesuai dengan penelitian yang diteliti, penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, dokumentasi, dan penelitian internet.

Persamaan regresi linier berganda Menurut (Sugiyono,2018) secara umum dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Sehingga dalam penelitian ini persamaan regresi linierberganda yakni:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Tingkat Kemiskinan

α = Konstanta

X1 = Tingkat Pendidikan

X2 = Upah Minimum

X3 = Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

β_3 = Koefisien Regresi

e = standart error (variabel penganggu)

Analisis regresi linier berganda adalah metode yang digunakan dalam analisis data penelitian ini untuk memahami bagaimana faktor-faktor tingkat pendidikan, gaji minimum, dan tingkat pengangguran terbuka mempengaruhi kemiskinan di lokasi unik Yogyakarta. Untuk Windows, 23. Gunakan praduga BIRU (Best Linear Unbiased Estimate) untuk menentukan koefisien pada persamaan linear (tidak bias). Sejauh mana variabel tingkat pengangguran terbuka, upah minimum, dan tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat kemiskinan di wilayah unik Yogyakarta ditentukan dengan menggunakan asumsi ini. Uji autokorelasi digunakan sebagai uji penerimaan dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas dan Multikorelasi (Ghozali, 2017:10). Untuk mencegah bias dalam uji-F dan uji-t, uji regresi harus independen dari uji BIRU (Sugiyono, 2018:21).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam studi ini, kemiskinan di provinsi unik Yogyakarta dikaji dalam kaitannya dengan tingkat pendidikan, gaji minimum, dan tingkat pengangguran terbuka. Badan Pusat Statistik Yogyakarta menyediakan data runtun waktu yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kategori data yang disusun secara kronologis selama periode

yang telah ditentukan. Data time series yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dan mencakup tahun 2010 sampai dengan tahun 2021 dengan menggunakan data tahunan.

Masalah kemiskinan yang sulit hadir di seluruh Indonesia, terutama di Yogyakarta, sebuah wilayah yang unik. Penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menganggapnya sangat serius. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tingkat keparahan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tabel 1 Data Jumlah Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	Jumlah Kemiskinan (Persen)
2010	16.83
2011	16.08
2012	15.88
2013	15.03
2014	14.55
2015	13.16
2016	13.10
2017	12.36
2018	11.81
2019	11.44
2020	12.80
2021	11.91

(Sumber: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta (diolah)

Tingkat Pendidikan

Pengetahuan akan ilmu dan keterampilan yang dimiliki adalah hasil dari pendidikan yang diperoleh, karena itu pendidikan menjadi penting bagi setiap individu. Dalam penelitian ini pendidikan di proksi kan dengan menggunakanrata-rata lama sekolah dimana indikator ini adalah indikator paling dasar yang sering digunakan BPS dalam melihat tingkat pendidikan pada daerah-daerah di Indonesia. Pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Data Tingkat Pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	Rata Lama Sekolah (Tahun)
2010	8,51
2011	8,53
2012	8,63
2013	8,72
2014	8,84
2015	9,00
2016	9,12
2017	9,19
2018	9,32

2019	9,38
2020	9,55
2021	9,64

(Sumber: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta (diolah))

Dapat dilihat bahwa sampai tahun 2021 rata-rata lama sekolah mengalami kenaikan walaupun belumsignifikan. Dengan adanya kondisi tersebut akan dapat meningkatkan peluang pendidikan yang diperoleh masyarakat. Upaya peningkatan pembangunan pendidikan ini tercermin juga dari perkembangan pembangunan sarana pendidikan, bahwa fokus pembangun pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah mulai bergeser dari penyediaan pendidikan dasar ke pendidikan menengah.

Upah Minimum

Data kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2010 hingga 2021 tidak lepas dari dampak rendahnya upah pemerintah kota. Rendahnya pendapatan penduduk setempat dipengaruhi oleh upah minimum, sehingga mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kualitas sumber daya manusia yang bervariasi di lokasi unik Yogyakarta mungkin menjadi penyebab rendahnya upah.

Tabel 3. Data Upah Minimum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	Upah Minimum (Rupiah)	Perkembangan (Persen)
2010	745.694	-
2011	808.000	8,35
2012	892.660	10,4
2013	947.114	6,1
2014	988.500	4,37
2015	988.500	0
2016	1.182.510	19,6
2017	1.337.645	13,1
2018	1.454.154	8,7
2019	1.570.923	8,0
2020	1.704.608	8,5
2021	1.765.000	3,5

(Sumber: BPS Daerah Istimewaa Yogyakarta (diolah))

Tingkat Pengangguran Terbuka

Selain upah minimum, daerah khas Yogyakarta juga dilanda kemiskinan akibat tingginya angka pengangguran. Skenario di mana angkatan kerja menginginkan pekerjaan tetapi belum menemukan pekerjaan digunakan untuk mengukur pengangguran. Tabel Data Tingkat Pengangguran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 sd 2021, Dilakukan BPS:

Tabel 4. Data Tingkan Pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun	Perkembangan (Persen)
2010	5,69
2011	4,32
2012	3,86
2013	3,24
2014	3,33
2015	4,07
2016	5,61
2017	3,02
2018	3,35
2019	3,14
2020	4,57
2021	4,56

(Sumber: BPS Daerah Istimewa Yogyakarta (diolah))

Pada Tingkat Pengangguran Terbuka di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cukup berfluktuatif, dimana pada tahun 2011 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 24% kemudian mengalami kenaikan di tahun 2017 sebesar 46,1%, setelah itu menurun di tahun 2018 sebesar 51,0,9%, dan meningkat kembali pada tahun 2020 sebesar 45,5% disebabkan pandemic covid yang mengakibatkan banyaknyapengangguran ditahun 2020.

Hasil Pengujian Uji Asumsi Klasik

Autokorelasi

Tabel 5. Uji Autokorelasi Model Summary

R Square Change	F Change	Df1	Df2	Sig. F Change	Durbin-Watson
0,820	30,850		8	0,000	1,270

Dari hasil analisis untuk uji autokorelasi pada penelitian ini diperoleh nilai *DW test* sebesar 1,270. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi dalam model penelitian maka dapat dibuktikan dengan kurva *DW*. Dalam persamaan ini jumlah variabel bebas (*k*) adalah 3 dan banyaknya data (*n*) adalah 10 sehingga diperoleh nilai *DW* tabel adalah sebesar $dL = 0,6577$ dan $dU = 1,8640$. Berdasarkan hasil analisis, maka dalam model regresi ini tidak adanya gejala autokorelasi dikarenakan nilai hasil *DW test* yang didapatkan adalah sebesar 1,270 yaitu dengan posisi berada pada daerah antara *dL* dan juga *dU* yang berarti berada dalam daerah keragu-raguan atau ketidakpastian. Sehingga dapat digunakan untuk melakukan pengujian selanjutnya.

Multikolinearitas

Tabel 6. Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	Ketentuan	Keterangan
X1	1.33	≤ 10	Tidak Terjadi Multikolinier

X2	1.50	≤10	Tidak Terjadi Multikolinier
X3	1.29	≤10	Tidak Terjadi Multikolinier

Maka hasil akhir yang didapatkan setelah melakukan pengujian analisis regresi linier berganda dapat diketahui bahwa dari ketiga variabel bebas dengan VIF untuk X1 sebesar 1,334; VIF untuk X2 sebesar 1,508; VIF untuk X3 sebesar 1,298 yang berarti dari kedua variabel bebas lebih kecil dari 10 sehingga ini tidak terjadinya gejala multikolinearitas.

Heterokedastisitas

Tabel 7. Tes Heterokedastisitas dengan Korelasi Rank Spearman

Variabel	Taile d (X1)	Taile d (X2)	Tailed (X3)	Ketentuan	Keterangan
Kemiskinan	0,444	0,966	0,985	≥ 0,05	Tidak terjadi heterokedastisitas

Berdasarkan tabel di atas, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel penjelas dan residual karena variabel bebas X1 memiliki koefisien korelasi rank Spearman sebesar 0,444, X2 sebesar 0,966, dan X3 sebesar 0,985 dengan residual lebih dari 0,05 (tidak signifikan). Ini mengarah pada kesimpulan bahwa persamaan tersebut homoskedastis. Tidak ada satupun model penelitian yang bertentangan dengan asumsi klasik, sesuai dengan hasil uji asumsi klasik tersebut di atas, maka dapat dilakukan analisis tambahan.

Analisis Regresi Linier Berganda Uji F

Tabel 8. Analisis Varian (ANOVA)

Model	Sum of Squares	D F	Mean Squares	F	Sig
1 Regression	30.998	3	10.333	12.11	.002
Residual	6.823	8	0.853	5	b
Total	37.821	11			

F hitung = 12,115 > F tabel = 4,07. Maka Ha diterima dan H0 ditolak. Yang artinya bahwa secara simultan variabel bebas yaitu Variabel Tingkat pendidikan (X1), Variabel Upah Minimum (X2), dan Variabel TPT (X3) berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap variabel terikatnya yaitu variabel tingkat kemiskinan.

Uji t

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis secara Parsial dari Variabel

Model	t Hitung	Sig.	t Tabel
X1 = Tingkat Pendidikan	-2,691	0,027	2,201
X2 = Upah Minimum	0,030	0,001	2,201
X2 = Tingkat Pengangguran	-4,688	0,488	2,201

Berdasarkan perhitungan diperoleh t hitung sebesar **-2,691** < t-tabel senilai 2,446 maka Ha diterima dan H0 ditolak dan. Maka artinya bahwa secara parsial variabel Tingkat Pendidikan (X1) berpengaruh terhadap Variabel Tingkat Kemiskinan. Hal ini juga didukung dengan nilai signifikan dari Upah Minimum (X2) sebesar 0,027 yang lebih kecil dari 0,05.

Dari hasil perhitungan dapat diperoleh T hitung sebesar -5,331 maka Ha diterima dan H0 ditolak dimana T hitung < T tabel 2,306, artinya variabel upah minimum (X2) secara parsial berpengaruh negative signifikan terhadap variabel Y tingkat kemiskinan didukung taraf sig sebesar 0.0001.

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh T hitung sebesar 0,727 H0 diterima dan Ha ditolak dimana T hitung < T tabel (2,306), dengan nilai signifikan yang diperoleh sebesar 0.488 atau dalam hal ini nilai signifikan t > 0,05 maka secara parsial variabel tingkat pengangguran terbuka (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y)

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil uji analisis diatas menunjukkan bahwa variabel Tingkat Pendidikan berpengaruh negative terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari perhitungan tersebut sudah sesuai dengan teori & kerangka pikir yang dikembangkan dalam penelitian ini. Apabila semakin meningkat tingkat pendidikan yang dimiliki semua masyarakat maka kompetensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut akan semakin tinggi juga. Hal tersebut akan berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat. Apabila tingkat pendapatan yang tinggi maka masyarakat dapat terbebas dari kemiskinan. Maka semakin banyak masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi maka akan semakin berkurang jumlah masyarakat miskin di suatu wilayah.

Dapat dikatakan bahwa kemiskinan akan terus meningkat selama 12 tahun apabila penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta masih menerima upah di bawah standar sesuai dengan tingkat pendidikan yang di selesaikan, lalu sifat pasrah dan bahagia yang dirasakan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun mereka hidup

dalam garis kemiskinan sudah menjadi karakter yang melekat di diri mereka.

Hal ini sesuai dengan teori ketika tingkat pendidikan turun, maka tingkat kemiskinan akan terus meningkat. Meskipun tingkat pendidikan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini semakin meningkat di setiap tahunnya akan tetapi kemiskinannya juga tetap tinggi. Hal ini disebabkan oleh penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta masih menerima upah di bawah standar sesuai dengan tingkat pendidikan yang diselesaikan.

Dibalik itu Pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selalu mendukung serta memfasilitasi berbagai program pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta guna meningkatkan kualitas SDM nya. Seperti beberapa program yakni mengadakan pendidikan bagi masyarakat yang belum duduk di sekolah formal berupa sekolah kejar paket, Mengadakan training dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan pelatihan keterampilan.

Pengaruh Upah Minimum Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil uji analisis diatas menunjukkan bahwa variabel Upah Minimum berpengaruh negative terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil dari uji analisis tersebut sudah sesuai dengan teori hipotesis dan kerangka pikir yang telah ada sebelumnya. Hasil ini menunjukkan bahwa upah minimum memiliki pengaruh negative terhadap kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hasil uji analisis ini tidak sesuai dengan teori hipotesis peneliti yang hasilnya dinyatakan adanya pengaruh positive dan signifikan upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Semakin tinggi tingkat upah minimum maka akan mengalami kenaikan juga pada pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan juga menaik dan sehinggaterbebas dari kemiskinan (Kaufman 2020 dalam jurnal Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan, 2020: 49). Serta terdapat data pendukung lain berupa artikel dari Soejoto dan Kharisma dapat dikatakan bahwa kemiskinan akan terus meningkat selama 12 tahun apabila penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta tidak menetapkan besarnya upah yang harus dibayarkan perusahaan pada pekerjanya agar dapat mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tingkat kemiskinan yang terus meningkat, lalu sifat pasrah dan bahagia yang dirasakan penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun mereka hidup dalam garis kemiskinan sudah menjadi karakter yang melekat di diri mereka.

Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan

Hasil pengujian dari analisis ini menunjukkan bahwa variabel TPT tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemiskinan,

sehingga dapat dikatakan bahwa tidak sesuai dengan hipotesis dan teori yang ada. Ini karena salah satu dengan system pemerintahan daerah keraton atau kerajaan adalah D.I. Yogyakarta. warisan budaya daerah masyarakat ini sudah melekat dan turun temurun di Yogyakarta (Prasetyoningrum & Sukmawati, 2018). Karakter sebagai abdi dalem yang selalu siap, patuh, dan tunduk kepada Sultan atau raja sudah mendarah daging bagi masyarakat Yogyakarta secara turun menurun. Apalagi peraturan dari kerajaan (Sultan) bahwa harus menjaga dengan ketat pengaruh budaya barat yang masuk ke D.I. Yogyakarta, dengan alasan untuk menjaga kelestarian budaya hal ini berdampak juga bagi perkembangan pola pikir masyarakat dan akhirnya berdampak bagi kemajuan ekonomi daerah.

Faktor sifat atau karakter masyarakat pasrah atau *nerimo ing pandum*. Dari sekian banyak suku etnis di Indonesia, Suku Jawa khususnya di D.I Yogyakarta paling santai/nyaman berkomunikasi. Sifat mereka terkenal dengan santun dan bisa menghargai sesama. Terkadang ketika terjadi suatu hal yang tidak sesuai, mereka masih bisa tersenyum. Jadi susah menyelami pikiran orang dari masyarakatnya. Dan juga khas gaya hidupnya terjaga baik. Walau dari proses perjalanan waktu ada begitu banyak wilayah yang berkembang dan besar.

Peraturan kerajaan sangat selektif terhadap pengaruh budaya barat dengan alasan menjaga kelestarian budaya. Karena kebanyakan budaya barat menyebabkan adanya penyimpangan. Penyimpangan itu berupa hilangnya nilai kesederhanaan, merosotnya etos perjuangan, merebaknya budaya instan, bahkan menjadikan *hedonisme* sebagai budaya baru di tengah masyarakat D I Yogyakarta.

Hal ini menyebabkan masyarakat di daerah D.I. Yogyakarta hanya bisa berpangku tangan terhadap peraturan sultan dan ini yang menyebabkan kemiskinan terus meningkat tiap tahunnya. Hasil uji analisis ini juga didukung oleh penelitian Wirawan dan Arka 2017 yang dimana dalam penelitian ini menyatakan bahwa pengangguran dengan ciri tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori ketika semakin tinggi tingkat pengangguran terbuka maka akan meningkatkan kemiskinan di Kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : a) Hasil dari penelitian diatas menunjukkan bahwa X1 (Tingkat Pendidikan) berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y Tingkat Kemiskinan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendidikan yang dimiliki

seorang dapat membuat kualitas masing – masing sumber daya manusia semakin meningkat. (Bintang & Woyanti, 2018) menyatakan jika akses pendidikan bagi masyarakat itu mudah akan membuat naiknya kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. b) Hasil dari pengujian menunjukkan bahwa variable X2 (upah minimum) berpengaruh positive signifikan terhadap variabel Y (tingkat kemiskinan) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dijelaskan jika adanya ketentuan nilai upah minimum ini jumlahnya harus diatas kebutuhan hidup layak masyarakat untuk kelangsungan hidupnya yang artinya bahwa adanya kenaikan upah tidak akan berarti jika angka kebutuhan hidup layak (KHL) masih berkisar diatas jumlah upah minimum (Tumangkeng, 2019). c) Hasil penelitian menunjukkan bahwa variable X3 (tingkat pengangguran terbuka) tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh terhadap variabel Y (tingkat kemiskinan) Faktor utama kenaikan TPT ini adalah karena pada saat itu pemerintah lebih berfokus pada pengembangan infrastruktur untuk dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka, selain itu juga ada faktor lain yakni pandemi covid-19 yang membuat banyak perusahaan tutup dan masyarakat kehilangan pekerjaan mereka (Kristinawati et al., 2018). d) Variabel X dalam Penelitian ini terdiri dari (Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan tingkat pengangguran terbuka) berpengaruh secara simultan (bersama-sama) terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Adhitya, B., Prabawa, A., & Kencana, H. (2022). Analisis Pengaruh Pendidikan, Kesehatan, Sanitasi dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga Per Rumah Tangga terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 288. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v6i1.501>
- Azis, M., Yulmardi, Y., & Nurhayani, N. (2021). Analisis pengaruh inflasi, pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 75–82. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i2.14214>
- Febrianica, D. N. (2015). Analisis Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah*.
- Ihsan, Khairil, Aceh, B., & Aceh, B. (2018). Khairil Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)*, 3(3), 408–419.
- Iksan, M., & Arka, S. (2017). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia
- Kemiskinan adalah permasalahan yang selalu di hadapi oleh semua negara di dunia dengan berbagai macam latar belakang dan juga penyebab. Dibeberapa negara bahkan kemiskinan menunjukkan gejala. *E-Jurnal EP Unud*, 11(1), 147–175.
- Islami, N., & Anis, A. (2019). Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(3), 939. <https://doi.org/10.24036/jkep.v1i3.7721>
- Kristinawati, A., Sarfiah, S. N., & Destiningsih, R. (2018). Analisis Pengaruh Pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1998-2018. *Directory Journal of Economic (DINAMIC)*, 2(4), 985–1004.
- Made Ariasih, N. L., & Yuliarmi, N. N. (2021). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Kesehatan dan Pengangguran Terbuka Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali. *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(7), 802–839. <https://doi.org/10.36418/cerdika.v1i7.131>
- Made, I., Wirawan, T., & Arka, S. (2013). *E-Jurnal EP Unud*, 4 [5] :546-560. 1999, 546–560.
- Mahsunah, D. (2013). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 1(3), 1–17.
- Pdrb, A. P., Terhadap, P., & Jawa, P. (2018). Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2009-2016. *Economics Development Analysis Journal*, 7(1), 23–31. <https://doi.org/10.15294/edaj.v7i1.21922>
- Prasetyoningrum, A. K., & Sukmawati, U. S. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Tenaga Kerja dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Equilibrium*, 6(2), 217–240. <http://eprints.ums.ac.id/80956/>
- Putri, E. M. & D. Z. P. (2021). Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran Terbuka, Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi*, 10(2), 106–114.
- Setya Ningrum, S. (2017). Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Indeks Pembangunan Manusia, Dan Upah Minimum Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2011-2015. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(2), 184–192.

- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 340. <https://doi.org/10.30998/jabe.v5i4.4183>
- Tumangkeng, R. Y. S. D. C. R. S. Y. L. (2019). Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(01), 88–98.
- van/indrawiguna. (2013). Dampak Pengangguran Terhadap Kemiskinan. *Jurnal Online Universitas Jambi*.
- Windra, Marwoto, P. B., & Rafani, Y. (2016). Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Tingkat Pengangguran terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Progresif Manajemen Bisnis (JIPMB)*, 14(2), 19–27. www.stie-ibek.ac.id